

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH
LANGKAP BUMIAYU BREBES**



TESIS

**Disusun Dan Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (MPd)**

O l e h :

IAI Nama
NIM

**: Nur Khayati
: 1717651051**

**PROGRAM STUDY MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCA SARJANA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH LANGKAP BUMIAYU BREBES

Nur Khayati

1717651051

ABSTRAK

Penelitian dilakukan karena fenomena pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap Bumiayu Brebes, mampu berjalan lancar dengan segala keterbatasan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan diskripsi tentang kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan di MI Muhammadiyah langkap Bumiayu Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian lapanagn engan pendekatan kualitatif. dan Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Pengujian keabsahan data didasarkan pada keterpercayaan, Transferebilitas dan konfirmabilitas/objektifitas.

Dari hasil analisis data diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: Pertama, Perencanaan pembiayaan dilakukan dengan menetapkan skala prioritas , dengan biaya BOS,yang merujuk PP, dengan perhitungan cermat , mengoptimalkan sumber daya, diformulasikan dan dioperasionalkan, menghasilkan desain ideal, hasil perencanaan berupa efisiensi anggaran.pemaksimalan fungsi manajemen dan kebutuhan siswa terakomodir. Kedua, Pengorganisasian memperhatikan ketersediaan sumber daya , memanfaatkan segala sesuatu yang telah ada sebagai bahan pertimbangan untuk mengorganisasikan program, memperhatikan skala prioritas, yang akan dijalankan agar tidak sukar dalam pelaksanaannya,dan dijabarkan berdasarkan program madrasah yang mengacu evaluasi diri madrasah.

Ketiga Aktuating pembiayaan melibatkan pelaksana bertindak sesuai perencanaan dengan petunjuk teknis BOS, pentingnya orientasi dan menggerakkan operator agar visi tercapai, semua pengeluaran di catat dan di SPJ kan. Pembagian wewenang dan tanggungjawab ditujukan agar terhindar dari penyalagunaan dan arogansi kekuasaan, dan pembiayaan yang tidak tercantum dalam perencanaan dapat disikapi dengan prinsip fleksibilitas dan kebermanfaatan anggaran.

Keempat Pengawasan berfungsi memonitoring seluruh aktifitas penggunaan pembiayaan anggaran pendidikan, mencegah terjadinya kesalahan, dan mencegah penyimpangan,Kenyataannya masih terdapat pembiayaan yang tidak tercantum dalam APBM, sehingga diperlukan tambahan biaya dari sumber lain.

Kata Kunci : Manajemen, Pembiayaan, pendidikan

*EDUCATION FINANCING MANAGEMENT IN MADRASAH IBTIDAIYAH
MUHAMMADIYAH LANGKAP BUMIAYU BREBES*

Nur Khayati
1717651051

ABSTRACT

The study was conducted because of the phenomenon of the implementation of education funding management at MI Muhammadiyah Langkap Bumiayu Brebes, able to run smoothly with all the limitations that exist. The purpose of this study was to obtain a description of the activities of planning, organizing the implementation, and monitoring the financing of education at MI Muhammadiyah langkap Bumiayu Brebes. This research is an eighth research with a qualitative approach. and Data collection is done using the method of interview, observation, documentation and triangulation. Testing the validity of the data is based on reliability, transferability and confirmation / objectivity.

From the results of data analysis, the research findings are as follows: First, financing planning is done by setting priority scale, with BOS costs, which refers to PP, with careful calculation, optimizing resources, formulated and operationalized, producing ideal designs, planning results in the form of efficiency budget. maximizing management functions and accommodating student needs. Second, Organizing takes into account the availability of resources, utilizes everything that already exists as a material consideration for organizing programs, paying attention to the priority scale, which will be carried out so that it is not difficult in its implementation, and described based on the madrasa program that refers to madrasah self-evaluation.

Third Actuating financing involves the executor acting in accordance with the planning with BOS technical guidelines, the importance of orientation and moving the operator so that the vision is achieved, all expenditures are recorded and in the SPJ right. The division of authority and responsibility is aimed at avoiding abuse and arrogance of power, and financing that is not listed in the plan can be addressed with the principle of flexibility and usefulness of the budget.

The four Supervision functions to monitor all activities using the education budget financing, prevent the occurrence of errors, and prevent irregularities. In fact, there is still funding that is not listed in the APBM, so additional costs are needed from other sources.

Keywords: Management, Financing, education

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II: MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH	
A. Konsep Manajemen	10
1. Pengertian Manajemen	10
2. Prinsip-Prinsip Manajemen	11
3. Fungsi Manajemen	13
4. Implementasi Manajemen	22
B. Pendidikan di Madrasah	25
1. Konsep Pendidikan Islam di Madrasah	25
2. Unsur – unsur Pendidikan di Madrasah	27

3.	Kurikulum Pendidikan di madrasah	29
4.	Pelaksanaan Pendidikan di Madrasah	32
C.	Standar Pembiayaan Pendidikan.....	33
1.	Jenis Biaya pendidikan	33
2.	Penghitungan Biaya Pendidikan	34
D.	Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah	39
1.	Konsep Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah	39
2.	Bentuk – Bentuk Desain Anggaran Pembiayaan Pendidikan	43
3.	Implementasi Pembiayaan Pendidikan	44
4.	Unsur – unsur Model Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah	46
5.	Model-Model Pembiayaan Pendidikan	48
6.	Strategi Pembiayaan Pendidikan dalam Penyusunan RAPBM	50
E.	Hasil penelitian yang relevan	52
F.	Kerangka Berfikir	54
BAB III: METODE PENELITIAN		
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B.	Tempat dan waktu Penelitian	56
C.	Subjek dan Objek Penelitian	57
D.	Teknik Pengumpulan Data	58
E.	Pengujian Keabsahan Data	62
F.	Teknik Analisis Data	63
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Objek Penelitian	66
1.	Gambaran Umum MI Muhammadiyah Langkap Bumiayu	66
2.	Pengembangan Program Madrasah	74
3.	Statistik Siswa Tenaga Pendidik dan kependidikan	75
B.	Deskripsi Data Penelitian dan Analisisnya	76
1.	Perencanaan/Planning Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap Bumiayu Brebes	76

2. Pengorganisasian/Organizing Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap Bumiayu Brebes	87
3. Pelaksanaan/Actuating Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap Bumiayu Brebes	95
4. Pengawasan/Controlling Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap Bumiayu Brebes	105

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran – saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

SK PEMBIMBING TESIS

RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komponen Pengeluaran	33
Tabel 2.	Strategi Pembiayaan Berdasarkan Sumber pendanaan.....	54
Tabel 3.	Contoh desain RAPBM.	55
Tabel 4.	Statistik Siswa 4 Tahun Terakhir.....	91
Tabel 5.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	91
Tabel 6.	Daftar pertanyaan dan hasil wawancara.....	139



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Model Penentuan Biaya Satuan Madrasah	47
Gambar 2. Biaya Pendidikan	48
Gambar 3. Kerangka Berfikir	68
Gambar 4. Skema Pengawasan	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Observasi
Lampiran 2	: Rangkuman Hasil Observasi
Lampiran 3	: Pedoman Wawancara
Lampiran 4	: Rangkuman hasil wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

James A.F. Stoner, seperti dikutip oleh T. Hani Handoko menyatakan bahwa Manajemen merupakan proses perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹ Definisi Manajemen yang lainnya menyebutkan bahwa manajemen merupakan seni memimpin terhadap sebuah proses untuk mencapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengevaluasian.² Pada intinya pengertian manajemen berkaitan dengan suatu kemampuan orang untuk menggerakkan, memapankan, menempatkan, dan memberdayakan orang lain dengan maksud agar mereka mampu bekerja secara terpadu, sistemik kearah tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Seperti halnya urusan manajemen lainnya, masalah manajemen pendidikan yang juga mengurus masalah peningkatan kualitas pendidikan pun bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, permasalahan manajerial, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks. Termasuk didalamnya permasalahan Manajemen Pembiayaan pendidikan.

Setiap penyelenggaraan suatu kegiatan membutuhkan adanya biaya atau uang untuk dapat terselenggaranya suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Uang dalam sebuah organisasi dapat diibaratkan sebagai bahan baku dalam sebuah perusahaan, dimana sebuah perusahaan tidak akan bisa melakukan proses produksi jika tidak ada bahan baku tersebut. Dalam bidang pendidikan, hampir bisa dikatakan semuanya membutuhkan uang atau biaya.

¹ T. Hani Handoko, Manajemen, edisi 2, penerbit BPFE-Yogyakarta, Oktober 2009, halaman 8.

² Fathul Aminudin Aziz, Manajemen dalam Perspektif Islam, Cet-2, Penerbit Pustaka El-Bayan, Cilacap, 2017, halaman 7.

Pengertian Manajemen keuangan dalam arti sempit disebut juga tata keuangan, sedangkan dalam arti luas merupakan pengurusan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah.³ Kegiatan Manajemen Keuangan dimanapun berada termasuk di sekolah, merupakan rangkaian aktivitas yang selalu dimulai dari Perencanaan program, Perkiraan anggaran, Pengorganisasian, Pelaksanaan sampai dengan Pengawasan dan Pertanggungjawaban keuangan.

Masalah biaya/keuangan pendidikan merupakan masalah mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembicaraan tentang biaya penyelenggaraan pendidikan, pada umumnya dibatasi pada pemahaman seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh sekolah dan atau berapa nominal yang harus dibayarkan oleh orang tua siswa. Pemahaman semacam ini memang tidak selamanya salah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyelenggaraan pendidikan juga bersentuhan dengan masalah sarana prasarana sekolah, insentif, gaji, juga honorarium tenaga pendidik dan kependidikan bagi pegawai non PNS, dan juga pembiayaan – pembiayaan lainnya.

Biaya pendidikan merupakan total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.⁴

Ketersediaan dana pendidikan sejak dahulu sampai sekarang masih menjadi masalah, baik biaya rutin maupun dalam usaha meningkatkan kualitasnya. Di negara berkembang termasuk Indonesia, sumber dana untuk membiayai pendidikan berasal dari APBN dan APBD, besarnya tergantung pada kemampuan negara dan komitmennya terhadap pendidikan. Tuntutan masyarakat sekarang bukan hanya sekedar terpenuhinya kewajiban belajar,

³ Sulistyorini dan Muhammad fathurrohman, Esensi Manajemen Pendidikan islam (Pengelolaan Lembaga untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam), Penerbit Kalimedia, Yogyakarta, cetakan 1-2016, halaman 216.

⁴ Dadang suhardan, dkk, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Alfabeta, Bandung, Februari 2014, halaman 22.

melainkan dituntut pendidikan yang murah dan berkualitas, oleh karena itulah pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan dana pendidikan yang besar, sebab pendidikan merupakan usaha rakasa dalam mencerdaskan bangsa.

Oleh karena itu, salah satu faktor yang mempunyai peran signifikan pada kemajuan dan mutu pendidikan adalah pengelolaan pembiayaan/pendanaan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Sulistyorini mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan besarnya perhatian pada keuangan, yaitu: *pertama*, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program – program pembaruan atau pengembangan pendidikan menjadi gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai; dan *kedua*, lazimnya keuangan itu sulit sekali didapatkan dalam jumlah yang besar khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.⁵

Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga – lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini, adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal.

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar, terutama yang bersatatus swasta, tentunya bersentuhan juga dengan masalah pembiayaan. Manajemen Pembiayaan/Keuangan di sekolah Islam atau Madrasah terutama

⁵ Ibid, halaman 216

berkenaan dengan: 1) kiat sekolah dalam menggali dana, yakni menghitung secara kasar seberapa banyak uang/dana yang akan diterima oleh sekolah, 2) kiat sekolah dalam mengelola dana yakni bagaimana madrasah mengelola pengeluaran dana dengan baik dan bijak, sehingga Proses Belajar mengajar dapat berjalan lancar dan kewajiban – kewajiban pembiayaan lainnya pun dapat diatasi dengan baik, serta 3) cara mengadministrasikan dana sekolah dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan.

Dalam permasalahan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah terus berusaha maksimal untuk memenuhinya. Hal ini dimaksudkan juga sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan nasional.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karenanya menurut Mulyasa, sebagaimana dikutip oleh Sulistyorini sumber keuangan pada suatu sekolah/sekolah Islam, secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua – duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. 2) Orang tua atau peserta didik. 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.⁶

Pemerintah melalui dana BOS yang digelontorkan sejak Juli tahun 2005 utamanya ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib belajar 9 tahun.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018, secara lengkap telah menentukan Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS tahun anggaran 2018. Di antaranya disebutkan bahwa pemberian Dana BOS pada: SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk: a) membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana

⁶ Sulistyorini dan Muhammad Fathurrohman, Esensi Manajemen Pendidikan Islam (Pengelolaan Lembaga untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam), Penerbit Kalimedia, Yogyakarta, cetakan 1-2016, halaman 217.

BOS; b) membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; c) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau d) membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.⁷

Selama ini besarnya dana BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut. Untuk jenjang SD sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun. Oleh karena itu keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, mengakibatkan biaya untuk investasi sekolah/madrasah/ponpes dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah, pemerintah daerah dan selanjutnya dari partisipasi masyarakat yang mampu.

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Langkap merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan dasar, setara Sekolah dasar (SD), yang didirikan oleh yayasan swasta yang berada di pedesaan dengan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat amat beragam. Awal berdirinya, 15 Januari 1961 Madrasah ini bermodal pada gotong royong murni dari masyarakat. Baru setelah terbit izin operasional dari pemerintah pada 1 Mei tahun 1974, Madrasah ini resmi terdaftar pada kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Ihsaniyah. Dan mulai tahun 1984 Madrasah ini dipayungi oleh organisasi Muhammadiyah.

Dari tahun ke tahun perkembangan MIM Langkap sangatlah pesat. Hal ini terbukti di tengah persaingan pendidikan yang terjadi akhir – akhir ini, MIM Langkap tetap diakui keberadaannya oleh masyarakat, terlihat dengan

⁷ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018, halaman. 10.

banyaknya jumlah murid yang ada dibanding dengan Sekolah Dasar – Sekolah Dasar yang ada di sekitarnya.

Untuk tahun ajaran 2018/2019 ini tercatat jumlah siswa/i MIM Langkap seluruhnya ada 214 siswa. Sementara jumlah tenaga pendidik dan kependidikan ada 11 orang. 2 orang guru berstatus PNS dan 9 orang guru berstatus Guru Wiyata Bakti/Honorer yayasan. 8 orang diantaranya sudah bersertifikasi pendidik dan 3 orang guru belum bersertifikasi. 9 orang guru lulusan S1 dan 2 orang guru masih dalam proses pendidikan S1. Sarana prasarana yang ada di MIM Langkap berada di atas tanah seluas 1000 m² dengan 9 ruang kelas berukuran 6 x 7 m, 1 ruang kantor dan 1 gudang dan 4 Kamar kecil. Nilai akreditasi terakhir yang diperoleh MIM Langkap berpredikat “B” Baik.

Menurut hasil wawancara antara penulis dengan kepala sekolah, keadaan tersebut menjadikan MIM Langkap membutuhkan pendanaan/ keadaan pembiayaan yang terhitung tidak sedikit. Sementara itu dana BOS dari pemerintah pusat besarnya bisa langsung dilihat dari jumlah siswa dikali Rp. 800.000,- per tahun. Kiranya itu belumlah cukup untuk membiayai operasional sekolah dan lain-lainnya. Oleh karena itu untuk memenuhi semua kebutuhan MIM langkap, pihak yayasan dan komite sekolah berusaha untuk menggali dana dari sumber lainnya, seperti dari unsur masyarakat dan pihak lain yang memiliki simpati terhadap jalannya pendidikan di MIM Langkap.

Dari itulah, akhirnya peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh dan menganalisa lebih detail, bagaimana manajemen pembiayaan Pendidikan di MIM Langkap berjalan, sehingga proses Kegiatan Belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik, tanpa mengesampingkan pembiayaan untuk kegiatan lainnya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes?
2. Bagaimana Pengorganisasian anggaran pembiayaan pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes?
3. Bagaimana Pelaksanaan pembelanjaan anggaran pembiayaan pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes?
4. Bagaimana Pengawasan penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara detail proses terencananya anggaran pembiayaan pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis proses pengorganisasian anggaran pembiayaan Pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan pembelanjaan anggaran pembiayaan Pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan penggunaan anggaran pembiayaan Pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca mengenai proses pengelolaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mampu memberikan masukan kepada berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan, yaitu:

a. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai proses pengelolaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIM Langkap Bumiayu Brebes.

b. Bagi Lembaga yang diteliti

Memberikan informasi dan masukan tentang proses pengelolaan Manajemen Pembiayaan pendidikan di sekolah. Sehingga MIM langkap tetap eksis dan senantiasa dipercaya oleh masyarakat, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan salah satu referensi, sehingga mampu mengembangkan kembali penelitian berdasarkan faktor lain yang dapat mempengaruhi output sekolah.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang terdiri dari 5 bab dan setiap bab memuat sub bab, di mana antara sub bab yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisan Tesis adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, halaman prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdapat lima bab yang akan dibahas dalam Tesis ini. Pertama, bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian/batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Tesis Kedua, bab II berisi landasan teori . Pada bab ini, akan dibahas mengenai konsep manajemen, Pendidikan Islam (madrasah), Standar Pembiayaan

pendidikan, Sistem pembiayaan Pendidikan Islam di madrasah, Penghitungan biaya pendidikan, Penelitian terdahulu dan Kerangka berfikir. Ketiga, bab III Membahas tentang Metode Penelitian. Pada bab ini akan dibahas Metode Penelitian, yang meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data. Keempat bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi: pertama Gambaran Objek Penelitian, yang berisi, Visi dan Misi MI Muhammadiyah Langkap, Struktur kepengurusan, statistik siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, kedua, Deskripsi data penelitian tentang 1) Perencanaan Pembiayaan Pendidikan MI Muhammadiyah Langkap. 2) Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap. 3) Pelaksanaan/Aktualisasi Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap. 4) Pengawasan/*Controlling* Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap. Ketiga, Analisis Data Penelitian berisi: 1) Analisis Data Perencanaan Pembiayaan Pendidikan MI Muhammadiyah Langkap 2) Analisis Data Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap. 3) Analisis Data Pelaksanaan/Aktualisasi Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Lngkap. 4) Analisis data Pengawasan/*controlling* Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Langkap. Bab V Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan secara keseluruhan, dan Saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari Daftar pustaka, dan Lampiran – lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, yang didahului menyusun RKAM, dengan menginventarisir, menganalisis, dan merumuskan daftar kebutuhan, oleh tim perencana. Selanjutnya tim bekerja membuat: rencana anggaran biaya, rencana pendanaan, dan menyelaraskan rencana biaya dengan pendanaan, kemudian dihitung beban biaya tersebut dengan merujuk PP. Agar RAPBM disusun dengan metode *costing* (pembiayaan) berdasar keefektifan biaya.
2. Pengorganisasian dilakukan dengan memerinci pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan dan monitoring. Pemerincian pekerjaan dilakukan dengan memerinci pekerjaan, yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan yaitu menentukan tugas – tugas apa yang dilakukan Tim penyusun (RAPBM) untuk memerinci 8 standar tersebut, kedua membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan – kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau Tim penyusun, dengan membagi 8 standar tersebut kepada Tim (koordinator kegiatan, Bendahara dan guru penanggungjawab kegiatan), ketiga menggabungkan pekerjaan para Tim penyusun program dengan rasional dan efisien untuk memudahkan dalam alokasi pembiayaannya. Keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan harmonis sehingga tujuan madrasah mudah dicapai dengan pembiayaan yang tersedia, bentuk pengkoordinasiannya dilakukan dengan rapat koordinasi, dimana semua tim memaparkan hasil pemerincian kebutuhan madrasah, kemudian plenokan dan disepakati bersama tim, untuk disusun menjadi dokumen APBM. Kelima,

melakukan monitoring dan mengambil langkah – langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas

3. Pelaksanaan/*actuating* di mulai mengacu perencanaan dan pengorganisasian, pada awal bulan Juli, pelaksana/tim mengajukan proposal kegiatan ke Kamad, setelah diteliti, ada kesesuaian dengan perencanaan, disetujui, bendahara mencairkan anggaran dengan rekomendasi Kamad untuk membelanjakan barang maupun jasa, seperti pembayaran gaji guru, dan belanja barang keperluan pembelajaran. Pelaksananya adalah tim belanja barang dan jasa, melalui koordinasi Kepala Madrasah dan Koordinator sarpras agar belanja barang dapat dikodering sebagai inventarisasi barang. Sebelum melaksanakan kegiatan aktuating di dahului langkah strategis, agar pelaksanaan berjalan maksimal dengan hasil optimal.
4. *Controlling* dilakukan secara periodik tiap tri wulan dan tahunan, semua pengeluaran dan penerimaan di catat dalam buku kas. Oleh Kasi Pendidikan madrasah dan Irjen Kemenag Pusat (pengawasan extern), dan pengawasan intern dari Kepala Madrasah dan yayasan (Pimpinan Ranting Muhammadiyah Langkap) kepada para tim pelaksana program kegiatan.

B. **Saran**

Setelah peneliti membahas data teori dan menganalisa data penelitian maka peneliti memberikan saran bagi Madrasah dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya, untuk memperoleh desain pembiayaan pendidikan yang ideal yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan MI Muhammadiyah Langkap kelak di kemudian hari:

1. Dalam membuat perencanaan pembiayaan pendidikan hendaknya memfokuskan pada 8 komponen standar pendidikan nasional, dan mempertimbangkan prioritas skala kebutuhan siswa, dengan

memaksimalkan semua sumber – sumber pendanaan madrasah, kelebihan dan kekurangannya.

2. Dalam mengorganisasikan pembiayaan pendidikan hendaknya mengakomodir berbagai masukan dari *steakholder* madrasah. Dalam mengorganisasikan pembiayaan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan menghindari program yang tidak teranggarkan, perlunya menggali sumber – sumber pembiayaan pendidikan yang lebih luas yang tidak memberatkan masyarakat, guru, dan siswa.
3. Dalam melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan hendaknya berprinsip pada kehati – hatian dan mengedepankan keterbukaan, dengan mekanisme tanggung jawab yang telah ditetapkan, memikul tanggungjawab dengan keihlasan, dan segera membuat laporan pertanggungjawaban di akhir kegiatan dalam bentuk SPJ.
4. Dalam melaksanakan proses *controlling*/pengawasan hendaknya dapat mengukur pelaksanaan/*actuating* terhadap standar yang ada agar kekurangan/kelemahan dalam mentasyarufkan pembiayaan pendidikan dapat diperbaiki.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib dan Mudzakir Jusuf, *Ilmu Pendidikan Islam, Kencana*, Jakarta, 2008.
- Abudin Nata. (2004) *Sejarah pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul. Akdon, et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2015
- Ali Mufron, *Ilmu Pendidikan Islam, Aura Pustaka*, Yogyakarta, 2013. Arif
- Arifudin, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Kultura ,Jakarta, 2008, hlm.57.
- Armida, *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Journal Media Akademika, Vol.26 No.1, Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2011.
- Malik Fajar. (1999). *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Asfila, Murniati, Nasir Usman. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Administrasi Pendidikan Vol 3 No. 4 Tahun 2015. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Buhari Luneto, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah*, Tadbir, Vol 3, No. 2, IAIN, Sultan Amai, Gorontalo, 2015.
- Dadang Suhardan, dkk. (2014) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* Bandung ; Alfabeta.
- Eko Susilo, *Metodologi Penelitian*, Airlangga, Jakarta, 2010.
- Hasbullah. (2001) *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* . Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- H.A.T Soegito, *Pergeseran Paradigmatik manajemen Pendidikan*, Widya Karya, Semarang, 2013.
- HM Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Husna Zikro, Yogyakarta, 1997.
- Husaini Usman, *Manajemen teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

- Jonh W Creswell ,*Reseach Dessign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Martin,(2014).*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*,Depok,PT Raja Grafindo Persada.
- Muflihini,Hizbul.(2017) *Administrasi Manajemen Pendidikan ,Teori dan Aplikasi*. Klaten, CV Gema Nusa.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Nanang Fattah. (2012) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung ; PT. Rosdakarya.
- Nanang Fatah.(2017).*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*.Bandung;PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*,PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Nanang Fattah, *Pembiayaan Pendidikan Landasan Teori dan Studi Empiris*, Journal Pendidikan dasar No.9, UPI, Bandung, 2008.
- Nur Uhbiyati, *Pendidikan Islam*, Rosda Karya, Bandung, 1998.
- Qomar Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, Airlangga, Jakarta, 2007.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan*, Kalam Mulia, Jakarta, 2011.
- Rahmini Hadi dan Parno. (2011) *Manajemen Keuangan (Konsep, Teori, dan Praktiknya di Sekolah dan Pondok pesantren*.Purwokerto; STAIN Press.
- Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, ,Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Setia Mulyawan. (2015) *Manajemen Keuangan*. Bandung ; Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

- Suhadi. (2015). *Manajemen pembiayaan Pendidikan Pada Pondok Pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Malang*. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universeitas negeri Semarang.
- Suhardan,Dadang,dkk. (2014).*Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*.(Bandung:alfabeta.
- Sulistiyorini dan Muhammad Fathurrohman. (2016). *Esensi Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.
- T. Hani Handoko. (2009). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ulpha Lisni Azhari, Dedy Achmad Kurniady. (2016). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah*. Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. XXIII No.2 Tahun 2016. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahyudi. (2009). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajar*. Bandung: Alfabeta.
- W.J.S. Poerwadarminta. (1984) *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Cet. VII; Jakarta; Balai Pustaka.



IAIN PURWOKERTO